



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjend. S. Parman No. 2 Kendari, Telp. 0401-3126053 Fax. 0401-3126172
website : dpmptsp.sultraprov.go.id - email : info.dpmptsp@sultraprov.go.id



DETAIL DAN DAFTAR PERSYARATAN IZIN

Nama Izin : PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN FASUM, FASOS ATAU IPR S/D 5 HA
Deskripsi : PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN FASUM, FASOS ATAU IPR S/D 5 HA
(ex IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) FASUM, FASOS ATAU IPR S/D 5 HA)
Sektor : KEHUTANAN
Delegasi : DINAS KEHUTANAN
Biaya : Tidak Ada
Durasi : 17 hari kerja
Perubahan Terakhir : 14 Aug 2021, Pukul 16:42:34 WITA
Dicetak Pada : 13 Sep 2024, Pukul 06:09:17 WITA

Persyaratan - Baru

No	Syarat	Deskripsi	Jenis Pemohon	Ket.	Format Persyaratan
1	Surat permohonan dilampirkan lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang domohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84	Surat permohonan ditujukan ke Kepala Dinas DPM-PTSP Prov. Sultra, rencana kerja dan peta lokasi ditandatangani pemohon spesimen asli (Bupati/Walikota)	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
2	Rekaman Identitas Pemohon	Rekaman Identitas Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
3	Rekaman NPWP Pemohon	Rekaman NPWP Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
4	NPWP Badan Usaha / Perorangan	NPWP Badan Usaha / Perorangan	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
5	Pernyataan Komitmen Memuat : 1. Menyelesaikan tata batas areal Peretujuan Penggunaan Kawasan hutan; 2. Melakukan Penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan; 3. Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola / pemegang izin usaha pemanfaatan hasil huta	Ditanda tangani pemohon dan bermaterai cukup spesimen asli	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
6	Pakta integritas yang memuat : a. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; b. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; c. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari menteri ; d. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; e. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; f. Melakukan permohonan	Dokumen asli atau copy legalisir	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
7	Peretujuan lingkungan dan	Peretujuan lingkungan dan	Perorangan,	Wajib	-

	dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perusahaan		
8	Peta Skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang di mohon	Peta Skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang di mohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
9	Analisa status dan fungsi kawasan hutan dari Kepala BPKH Wil.XXII Kendari	Analisa status dan fungsi kawasan hutan dari Kepala BPKH Wil.XXII Kendari	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
10	Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS	Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
11	Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
12	Fotocopy Sertifikat Kepesertaan dan Surat Keterangan Dari BPJS Ketenagakerjaan Kendari Bahwa Telah Terdaftar dan Tertib Administrasi	Fotocopy Sertifikat Kepesertaan dan Surat Keterangan Dari BPJS Ketenagakerjaan Kendari Bahwa Telah Terdaftar dan Tertib Administrasi	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
13	Surat Kuasa Surat kuasa bermaterai bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha	Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha	Perorangan, Perusahaan	Optional	-
14	Rekaman KTP Kuasa	Foto Copy KTP Kuasa	Perorangan, Perusahaan	Optional	-
15	Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)	Berkas Persyaratan 2 Rangkap (khusus permohonan offline dengan berkas fisik)	Perorangan, Perusahaan	Optional	-